

KATALOG : 3101028.6571

Statistik Sosial Ekonomi KOTA TARAkan 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TARAkan**



Statistik
Sosial Ekonomi
KOTA TARAKAN
2018

STATISTIK SOSIAL EKONOMI KOTA TARAKAN 2018

Nomor Katalog :
3101028.6571

Nomor Publikasi :
65710.1923

Ukuran Buku :
18,2 cm X 25,7 cm

Jumlah Halaman :
xii + 78 halaman

Naskah :
Seksi Statistik Sosial BPS Kota Tarakan

Perwajahan :
Seksi Statistik Sosial BPS Kota Tarakan

Diterbitkan oleh :
© BPS Kota Tarakan

**“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”**

Pengarah :

Ir. Imam Sudarmaji

Penanggung Jawab Teknis :

Anis Setiyorini, SST., M.Stat.

Penyusun Naskah :

Epi Dipayama, SST.

Pengolahan Data :

Epi Dipayama, SST.

Gambar Kulit :

Epi Dipayama, SST.

Editor :

Anis Setiyorini, SST., M. Stat.

Tim Penyusun

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya penyusunan publikasi Statistik Sosial Ekonomi Kota Tarakan 2018 ini telah selesai dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan data kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Tarakan.

Publikasi ini menyajikan data yang dikumpulkan langsung oleh BPS melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 maupun Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018, dengan maksud untuk memberikan gambaran umum hasil pembangunan sosial ekonomi di Kota Tarakan. Publikasi ini menyajikan informasi dasar tentang keadaan sosial seperti kependudukan, ketenagakerjaan, maupun perumahan dan keadaan ekonomi masyarakat seperti pola konsumsi masyarakat.

Akhir kata, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan, termasuk masyarakat pengguna data sebagai bahan rujukan penelitian ataupun monitoring evaluasi kinerja pemerintahan.

Tarakan, Desember 2019

Kepala Badan Pusat Statistik

Kota Tarakan,



Ir. Imam Sudarmaji

NIP. 19680416 199401 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATALOG	ii
TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
Bab 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	7
1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data	7
1.4 Metodologi	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
Bab 2 KONSEP DAN DEFINISI	11
Bab 3 KEPENDUDUKAN	23
3.1 Jumlah Penduduk	27
3.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk	28
3.3 Profil Rumah Tangga	31
3.4 Profil Kepala Rumah Tangga	33
Bab 4 KETENAGAKERJAAN	37
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	40
4.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	44
4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	45
4.4 Jumlah Jam Kerja	49
Bab 5 PERUMAHAN	51
5.1 Status Kepemilikan Rumah	54
5.2 Kualitas Rumah Tinggal	55
5.3 Fasilitas Rumah Tinggal	58
Bab 6 POLA KONSUMSI	63
Bab 7 PENUTUP	71
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tarakan Menurut Kecamatan, 2018	30
Tabel 2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Kota Tarakan Tahun 2018	48
Tabel 3. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Seluruh Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kota Tarakan Tahun 2018	50

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.	Jumlah Penduduk Kota Tarakan, Tahun 2013-2018	28
Gambar 2.	Sebaran Penduduk Kota Tarakan Menurut Kecamatan, Tahun 2018	29
Gambar 3.	Persentase Rumah Tangga menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga, Kota Tarakan Tahun 2018	32
Gambar 4.	Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin, Tahun 2018	35
Gambar 5.	Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga, Tahun 2018	36
Gambar 6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin, Kota Tarakan Tahun 2017-2018	42
Gambar 7.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin Kota Tarakan, Tahun 2017-2018	43
Gambar 8.	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Jenis Kelamin, Kota Tarakan Tahun 2017-2018	45
Gambar 9.	Persentase Penduduk berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Kerja Utama, Tahun 2018	46
Gambar 10.	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati, Tahun 2018	55
Gambar 11.	Persentase Rumah Tangga Menurut Kualitas Rumah, Tahun 2018	56
Gambar 12.	Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Tempat Tinggal (m ²), Kota Tarakan Tahun 2018	57
Gambar 13.	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Utama Penerangan Rumah Tangga, Kota Tarakan Tahun 2018	59

HALAMAN PENGANTAR

Gambar 14.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak, Tahun 2018	60
Gambar 15.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2018	61
Gambar 16.	Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2018	61
Gambar 17.	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran, 2017-2018	68
Gambar 18.	Pola Konsumsi Rumah Tangga di Kota Tarakan, 2017-2018	68
Gambar 19.	Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Tarakan, 2018	69







<https://www.nurafan.com/buku/bps-go>

BAHAGIAN 1

PENDAHULUAN

Rumah Adat Tidung



Rumah Adat Tidung

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memiliki tujuan yang berbudi luhur dalam upaya meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan Warga Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Setiap upaya pelaksanaan pembangunan nasional selalu memiliki berbagai periode pembangunan yang masing-masing memiliki tahapan dan kebijakan yang berbeda tetapi masih dalam satu koridor pencapaian tujuan pembangunan nasional. Seperti yang tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional dapat dijabarkan:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;

- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Upaya perwujudan tujuan nasional tersebut akan memberikan dampak yang berbeda pada setiap pelaksanaan periode pembangunan daerah. Pada perencanaan pembangunan Nasional periode 2014-2019, Ir. Joko Widodo selaku presiden memiliki agenda prioritas yang ingin dilaksanakan dalam lima tahun pembangunan nasional. Agenda prioritas tersebut dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visi dan misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Tarakan memiliki kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat dari berbagai sektor khususnya sektor potensial di Kota Tarakan seperti perikanan, jasa, maupun perdagangan. Dalam upaya mewujudkan berbagai visi pembangunan Kota Tarakan, kebijakan-kebijakan strategis dirumuskan sesuai dengan koridor pelaksanaan NAWA CITA presiden Joko Widodo, terutama permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu topik hangat dalam setiap pembahasan permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, hingga permasalahan menyangkut ketertiban dan keamanan.

Sebagai acuan perumusan kebijakan pemerintah daerah dalam menetapkan dokumen perencanaan pembangunan, perlu dilihat bagaimana potret pembangunan sosial ekonomi daerah sehingga setiap kebijakan yang dibuat relevan dengan pemecahan permasalahan pembangunan yang sedang dialami oleh daerah. Tak terkecuali Kota Tarakan, sebagai kota jasa dan perdagangan di

Provinsi Kalimantan Utara, pemerataan kesejahteraan penduduk seyogyanya lebih mudah untuk diwujudkan mengingat perekonomian ditopang oleh sebagian usaha mikro kecil. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu diintegrasikan antara kondisi sosial kependudukan serta perekonomian daerah sehingga dapat dirumuskan formula kebijakan yang relevan dan tepat sasaran.

Data dan informasi pembangunan merupakan suatu potret hasil dari pembangunan yang dilaksanakan selama periode pembangunan hingga saat ini. Data dan informasi yang menggambarkan kondisi daerah tersebut akan memberikan dasar bagi para *stakeholders* dalam merumuskan kebijakan strategis maupun program dan kegiatan pembangunan. Merujuk hal tersebut, pembuatan publikasi “Statistik Sosial Ekonomi Kota Tarakan” merupakan suatu publikasi yang berisikan data dan informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kota Tarakan dari berbagai sudut pandang berbeda sehingga dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah kota dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Selain itu, publikasi ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi maupun masyarakat dalam membuat kajian atau perihal lainnya demi kemajuan bersama Kota Tarakan.

1.2 Tujuan

Tujuan utama diterbitkannya publikasi ini yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai keadaan sosial ekonomi di Kota Tarakan. Secara spesifik penyusunan publikasi ini memiliki tujuan yaitu:

- a. Menyediakan data dasar karakteristik sosial ekonomi rumah tangga di Kota Tarakan; dan
- b. Memberikan informasi sebagai evaluasi sekaligus perencanaan pembangunan daerah khususnya dalam bidang kependudukan.

1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Publikasi ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018. Sumber data tersebut bersifat primer karena dikumpulkan secara langsung dan diolah oleh BPS.

Susenas dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia dengan ukuran sampel secara nasional sebesar 300.000 rumah tangga yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Sampel susenas hanya mencakup rumah tangga biasa, tidak termasuk rumah tangga khusus seperti barak militer, asrama, penjara, dan sejenisnya. Sampel Susenas Maret 2018 untuk Kota Tarakan sebesar 530 rumah tangga yang tersebar di 4 kecamatan. Data yang dihasilkan cukup representatif untuk menghasilkan estimasi sampai dengan tingkat kabupaten/kota namun tidak dapat dibedakan menurut daerah tempat tinggal (perkotaan/perdesaan).

1.4 Metodologi

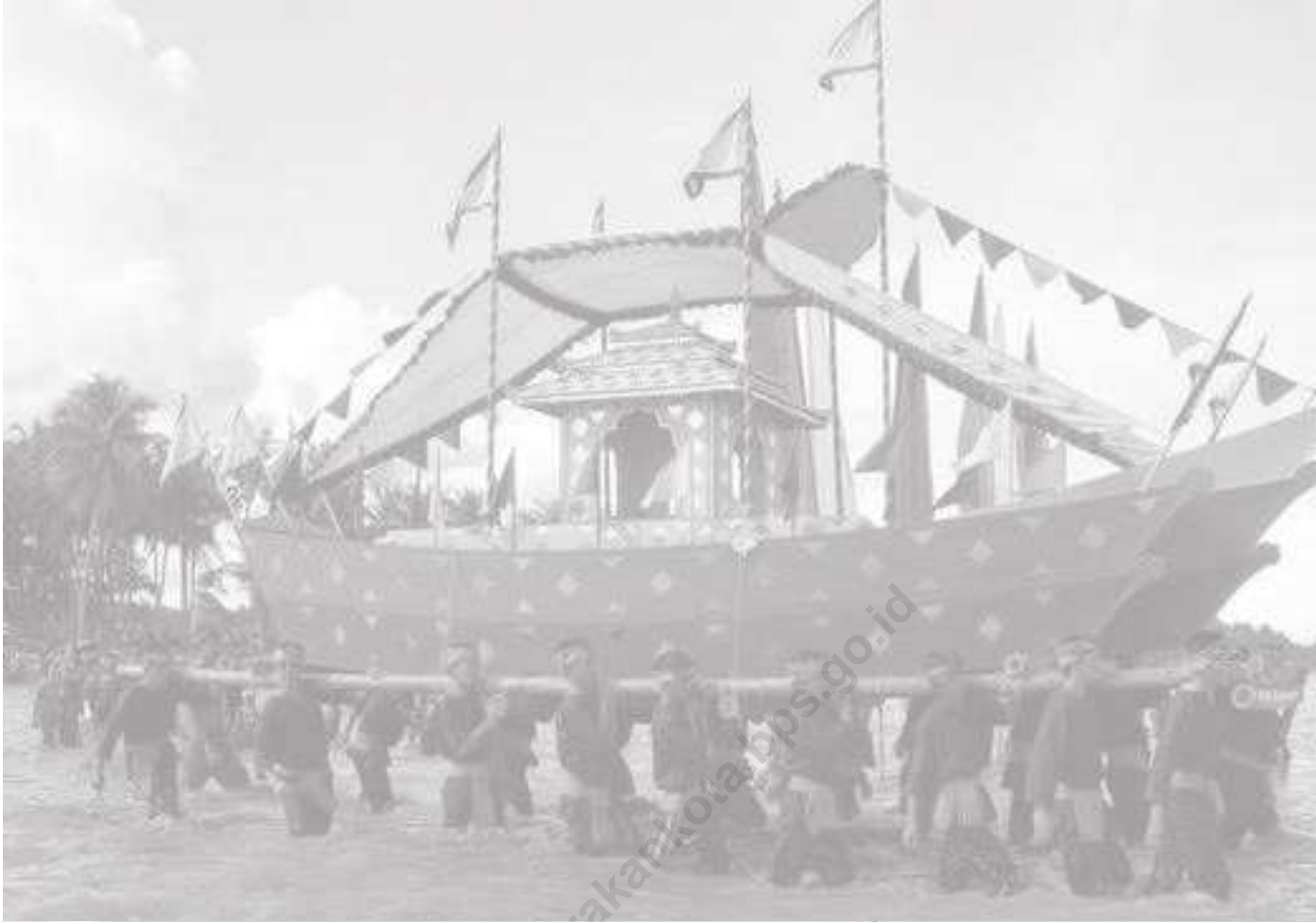
Publikasi ini sebagian besar menggunakan data yang bersumber dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018. Beberapa jenis data yang dikumpulkan pada Susenas 2018 dan digunakan dalam publikasi ini antara lain keterangan anggota rumah tangga, perumahan, dan pola konsumsi rumah tangga. Sedangkan keterangan mengenai kependudukan bersumber dari data Proyeksi Penduduk Kota Tarakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Kajian dalam publikasi ini terbatas pada menampilkan informasi-informasi yang terkait dengan dinamika kependudukan Kota Tarakan. Penyajian publikasi ini diuraikan dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang, tujuan, ruang lingkup dan sumber data, metodologi, serta sistematika penulisan.
- BAB II KONSEP DAN DEFINISI, meliputi berbagai konsep dan definisi yang digunakan dalam analisis sosial dan ekonomi Kota Tarakan.
- BAB III KEPENDUDUKAN, meliputi jumlah, sebaran dan kepadatan penduduk, profil rumah tangga dan profil kepala rumah tangga.
- BAB IV KETENAGAKERJAAN, meliputi indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi ketenagakerjaan, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), lapangan usaha dan status pekerjaan serta jumlah jam kerja.

- BAB V PERUMAHAN, meliputi beberapa karakteristik perumahan, antara lain status kepemilikan rumah, kualitas rumah tinggal, dan fasilitas rumah tinggal.
- BAB VI POLA KONSUMSI, meliputi meliputi indikator-indikator yang berkaitan dengan kondisi pola konsumsi, antara lain rata-rata pengeluaran per kapita sebulan, pola konsumsi makanan dan non makanan serta distribusi pendapatan.
- BAB VI PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran.



<https://tarakankota.bps.go.id>



Iraw Tengkeyu

ILIRI, IGIUKSIAN

Konsep dan definisi yang digunakan pada publikasi Statistik Sosial Ekonomi Kota Tarakan adalah konsep dan definisi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang mengacu pada konsep maupun kesepakatan internasional. Berikut konsep dan definisi yang digunakan dalam Statistik Sosial Ekonomi Kota Tarakan:

- Penduduk : Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Penduduk Kota Tarakan : Semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kota Tarakan selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili

	: kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
Luas Wilayah	: Daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial sebuah daerah baik itu wilayah daratan maupun lautan yang didalamnya diberlakukan yurisdiksi daerah tersebut.
Sebaran Penduduk	: Bentuk penyebaran penduduk disuatu wilayah dan dapat menjadi indikator apakah penduduk dalam wilayah tersebut sudah tersebar secara merata atau tidak.
Kepadatan Penduduk	: Menunjukkan banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.
Rumah Tangga	: Seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Satu dapur yang dimaksud merupakan suatu kesatuan pembiayaan dan kepengurusan kebutuhan sehari-hari rumah tangga dikelola secara bersama-sama.
Kepala Rumah Tangga	: Salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala dalam rumah tangga
Anggota Rumah Tangga	: Semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang sedang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak berada di rumah
	Yang termasuk anggota rumah tangga
	<ol style="list-style-type: none">1. Bayi yang baru lahir.2. Orang yang sudah tinggal 6 bulan atau lebih, meskipun belum berniat untuk menetap (pindah datang). Termasuk orang yang belum tinggal 6 bulan tetapi

sudah meninggalkan rumahnya 6 bulan atau lebih.

3. Orang yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk menetap (pindah datang).
4. Pembantu rumah tangga, tukang kebun atau sopir yang tinggal dan makannya bergabung dengan rumah tangga majikan.
5. Orang yang mondok dengan makan (indekos) jumlahnya kurang dari 10 orang.
6. Kepala rumah tangga yang bekerja di tempat lain (luar BS), tidak pulang setiap hari tapi pulang secara periodik (kurang dari 6 bulan) seperti pelaut, pilot, sopir antar pulau, pedagang antar pulau, pekerja tambang dsb.

Ijazah/STTB	: Bukti tanda tamat sekolah yang telah menyelesaikan pelajaran dan ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah
Penduduk Usia Kerja	: Terdapat beberapa pendekatan dalam menentukan batas usia kerja, bergantung pada kebutuhan dan arah analisa yang diinginkan. Dalam publikasi ini, batas usia kerja yang digunakan adalah penduduk yang berusia 15 tahun.
Bukan Angkatan Kerja	: Penduduk usia 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) hanya melakukan aktifitas sekolah, mengurus rumah tangga, atau tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan.

- Angkatan Kerja** : Penduduk usia 15 tahun keatas yang selama seminggu yang lalu (pada masa referensi survei) mempunyai pekerjaan, baik yang memang melakukan aktifitas bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena satu dan lain hal seperti sedang cuti, menunggu panen, atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja profesional seperti penyanyi, dukun, dalang, dsb). Selain itu, termasuk pula kedalam kategori angkatan kerja yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan dapat pekerjaan (pengangguran).
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** : Merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan rasio penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah memperoleh pekerjaan maupun yang belum.
- Pengangguran** : Meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja atau sudah mempunyai usaha tapi belum memulainya.
- Tingkat Pengangguran Terbuka** : Merupakan ukuran yang dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar pengangguran yang ada. Tingkat Pengangguran merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan diantara penduduk usia kerja yang siap kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan.

- Bekerja** : Kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.
- Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha.
- Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** : Merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja terhadap angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya angkatan kerja yang bekerja.
- Status Pekerjaan** : Jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari:
1. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
 2. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dengan mempekerjakan buruh tidak tetap/pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.
Buruh/karyawan/pegawai tidak tetap adalah buruh/karyawan/pegawai yang

bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dan hanya menerima upah berdasarkan banyaknya waktu kerja atau volume pekerjaan yang dikerjakan

3. **Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar** adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.

Buruh/karyawan/pegawai

tetap/dibayar adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.

4. **Buruh/karyawan/pegawai** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir. Khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan.
5. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun

barang, baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk jasa pertanian

6. **Pekerja bebas di nonpertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Usaha nonpertanian adalah usaha di seluruh sektor selain sektor pertanian

7. **Pekerja keluarga/tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha (baik ART atau bukan) dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang

Rumah : Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman). Termasuk dalam klasifikasi rumah adalah bangunan tempat tinggal lainnya yang dapat dijadikan tempat berhuni misalnya apartemen, kondominium, dll.

Status Kepemilikan : Merupakan status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang meliputi:

1. **Milik Sendiri** adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana pada waktu pencacahan rumah yang ditempati oleh rumah tangga merupakan milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota

rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri.

2. **Kontrak** adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru.

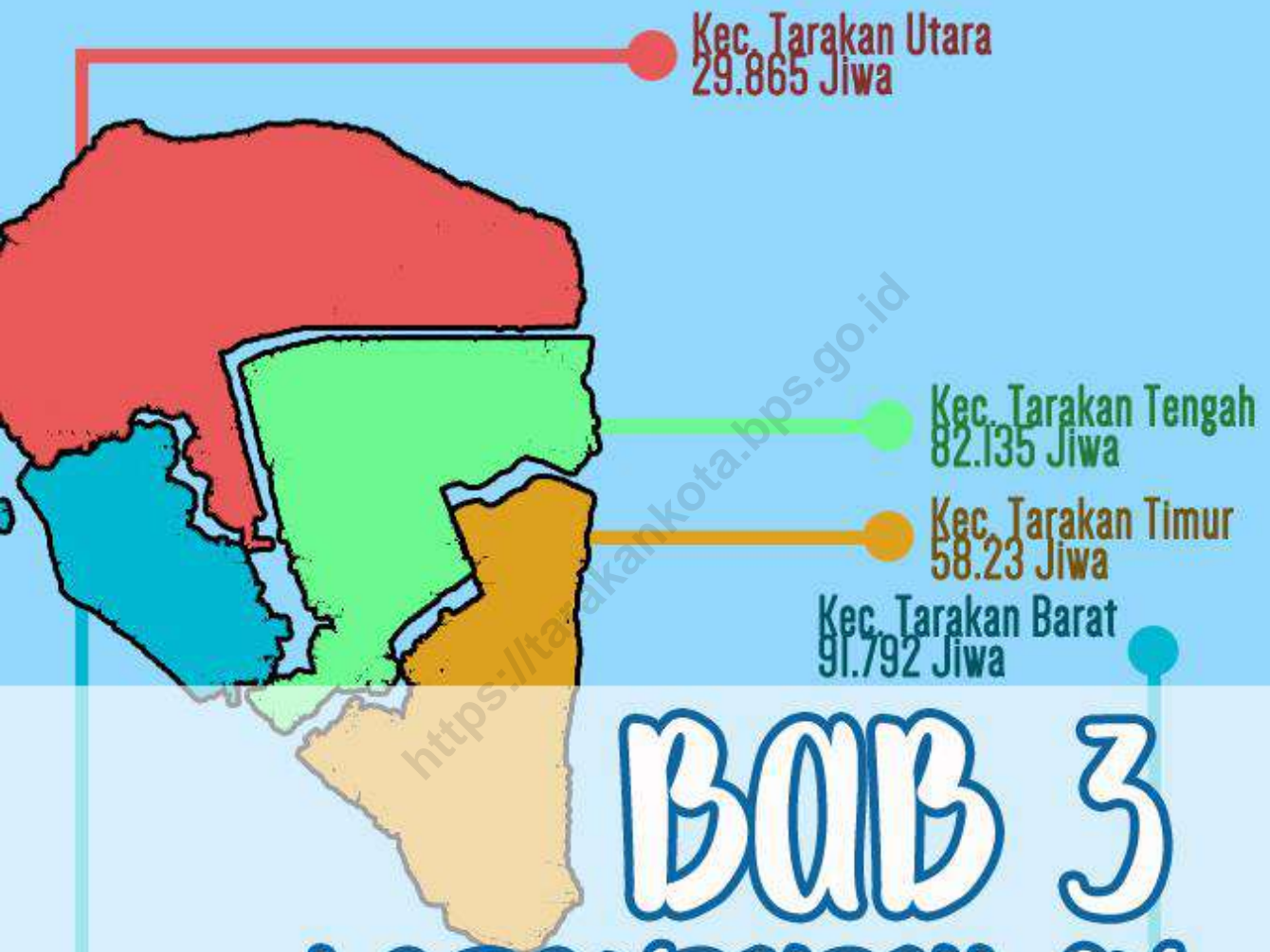
Sewa adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut disewa oleh kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu.

3. Bebas sewa adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (baik famili/bukan famili/orang tua yang tinggal di tempat lain) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun.

4. Dinas adalah status kepemilikan tempat tinggal dimana tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi tempat bekerja salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak.
5. Lainnya adalah status kepemilikan selain yang tersebut di atas seperti rumah adat dsb.

Air Minum Layak dan Bersih : Air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Jumlah Penduduk



BAIB 3 KEPENDUDUKAN



KABUPATEN NUNUKAN

MALINAU

KABUPATEN BULUNGAN

TANJUNGSOLOR

KABUPATEN BERAU

TANJUNGREDEB

MALINAU

NUNUKAN

TARAKAN

Jumlah penduduk suatu wilayah, akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini ditentukan oleh tiga faktor utama yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Jumlah penduduk dikaitkan dengan struktur, komposisi, serta persebaran penduduk menjadi informasi penting yang berguna sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan yang potensial, akan tetapi jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi beban pembangunan dan memicu munculnya permasalahan terkait penyediaan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang serta perumahan. Untuk itu peningkatan jumlah penduduk semestinya diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, baik

pendidikan maupun kesehatan sehingga tidak menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan hal di atas, penduduk merupakan salah satu bahasan pokok yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan khususnya mengenai jumlah, komposisi dan distribusinya. Dalam proses dan kegiatan pembangunan, penduduk memiliki peran yang sangat penting, baik sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak diperlukan. Penduduk yang berkualitas rendah hanya akan menjadi beban pembangunan, apalagi jika penyebaran penduduknya tidak merata secara geografis.

Dampak meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan banyak permasalahan, antara lain penyediaan kebutuhan-kebutuhan penduduk, seperti kesehatan, pendidikan, makanan, sandang dan perumahan. Sedangkan keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan merupakan kendala bagi perkembangan penduduk yang terlalu cepat. Oleh karena itu pertumbuhan penduduk perlu dikontrol dan dikendalikan.

Berdasarkan uraian di atas, informasi terkait kependudukan meliputi jumlah, sebaran dan kepadatan penduduk, profil rumah tangga serta profil kepala rumah tangga akan menjadi bahasa dalam bab ini.

3.1 Jumlah Penduduk

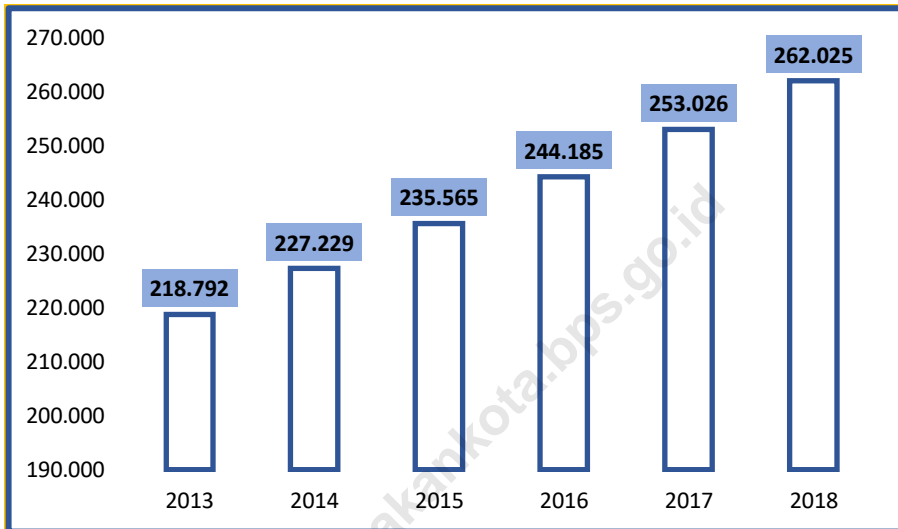
Jumlah penduduk suatu wilayah akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini ditentukan oleh tiga faktor utama yakni kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Jumlah penduduk dikaitkan dengan struktur, komposisi, serta persebaran penduduk menjadi informasi penting yang berguna sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan suatu wilayah.

Jumlah penduduk yang besar merupakan modal pembangunan yang potensial, akan tetapi jumlah penduduk yang besar juga dapat menjadi beban pembangunan dan memicu munculnya permasalahan terkait penyediaan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang serta perumahan. Untuk itu peningkatan jumlah penduduk semestinya diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri, baik pendidikan maupun kesehatan sehingga tidak menjadi beban pembangunan.

Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa jumlah penduduk Kota Tarakan mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Jumlah penduduk Kota Tarakan pada tahun 2018 menurut angka proyeksi penduduk sebanyak 262.025 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 3,55 persen. Namun bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya yaitu tahun 2013, jumlah penduduk di Kota Tarakan mengalami kenaikan sebesar 19,76 persen dengan pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 3,67 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu 5 tahun, dari tahun

2013-2018 jumlah penduduk di Kota Tarakan mengalami penambahan penduduk sebesar 43.233 jiwa.

Gambar 1.
Jumlah Penduduk Kota Tarakan, Tahun 2013-2018



Sumber : *Proyeksi Penduduk, Badan Pusat Statistik Kota Tarakan*

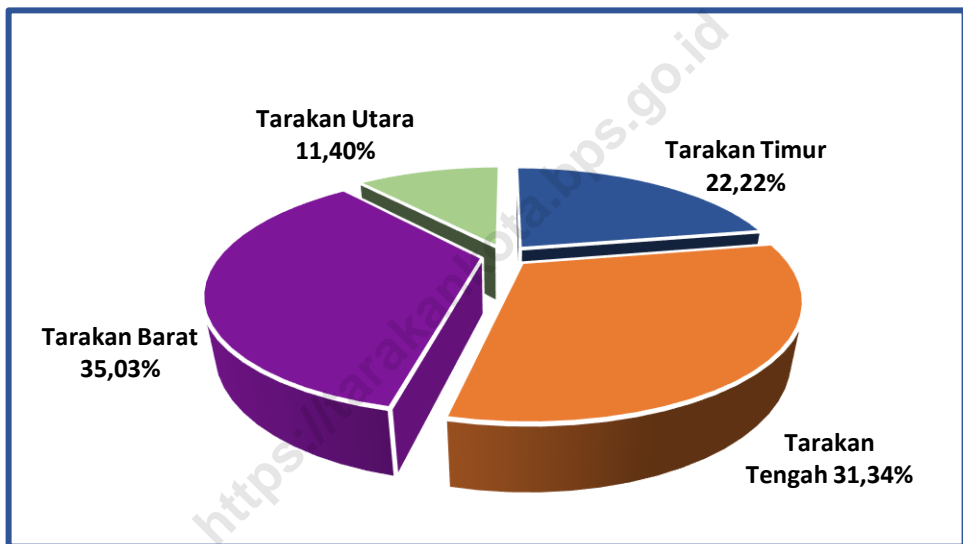
3.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Penyebaran penduduk yang tidak merata berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang antar kabupaten/kota. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah juga akan menimbulkan berbagai masalah penyediaan sarana dan prasarana dan rawan terjadinya konflik sosial masyarakat. Sebaliknya jika tingkat kepadatan penduduk sangat rendah akan menyebabkan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat menjadi relatif mahal karena tempat tinggal penduduk menjadi sangat tersebar. Namun demikian, tingkat kepadatan yang ideal memang sulit ditentukan karena sangat tergantung terhadap potensi yang dimiliki

suatu wilayah serta kemampuan penduduk untuk memanfaatkan potensi yang ada. Indikator kepadatan penduduk akan lebih bermakna apabila dikaitkan dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana serta sumber daya alam seperti, air, lingkungan bersih, dan sumber energi atau potensi ekonomi.

Gambar 2.

Sebaran Penduduk Kota Tarakan menurut Kecamatan, Tahun 2018



Sumber : *Proyeksi Penduduk, Badan Pusat Statistik Kota Tarakan*

Berdasarkan Gambar 2 terlihat pola persebaran di Kota Tarakan terlihat belum merata sehingga terjadi perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan. Data tahun 2018 menunjukkan sebagian besar penduduk Kota Tarakan terkonsentrasi di Kecamatan Tarakan Barat dengan persentase mencapai 35,03 persen. Meskipun Kecamatan Tarakan Barat merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Tarakan, namun ini tidak membatasi penduduk untuk tinggal di kecamatan ini.

Kecamatan Tarakan Utara memiliki luas wilayah terbesar dibanding kecamatan lainnya namun persebaran penduduknya paling kecil yaitu sebesar 11,40 persen pada tahun 2018. Lokasi Kecamatan Tarakan Utara yang jauh dari kota dan ketersediaan fasilitas yang kurang menyebabkan kurangnya minat penduduk untuk tinggal di kecamatan ini.

Tabel 1.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Tarakan menurut Kecamatan, 2018

Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tarakan Timur	58,01	58.233	1.003,84
Tarakan Tengah	55,54	82.135	1.478,84
Tarakan Barat	27,89	91.792	3.291,21
Tarakan Utara	109,36	29.865	273,09
Kota Tarakan	250,80	262.025	1.044,76

Sumber : *Proyeksi Penduduk, Badan Pusat Statistik Kota Tarakan*

Tingkat kepadatan penduduk (*population density*) merupakan suatu langkah awal untuk dapat memperoleh gambaran tentang kemampuan wilayah dalam memberikan daya tampung dan daya dukung terhadap penduduk yang ada. Suatu wilayah secara umum dipergunakan sebagai tempat tinggal, jalan dan tempat penduduk melaksanakan kegiatan untuk kelangsungan hidupnya, seperti untuk gedung perkantoran, pabrik, lahan pertanian, sarana untuk pendidikan, keagamaan, dan sebagainya, maka tanah memiliki

keterbatasan kemampuan untuk menampung dan memberikan daya dukung dan daya tampung terhadap penduduk.

Secara umum, pada tahun 2018 kepadatan penduduk di Kota Tarakan sebesar 1.044,76 jiwa per km². Ini berarti bahwa setiap 1 km² wilayah dihuni oleh 1.044 sampai dengan 1.045 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Tarakan Barat yang cukup tinggi dan luas wilayah yang kecil (11,67 persen dari total wilayah Kota Tarakan) menjadikan Kecamatan Tarakan Barat sebagai daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Tarakan, kepadatan penduduknya pada tahun 2018 mencapai 3.291,21 penduduk per km². Sedangkan kecamatan Tarakan Utara yang luas wilayahnya paling besar hanya memiliki kepadatan 273,09 penduduk per km².

3.3 Profil Rumah Tangga

Rumah tangga pada kegiatan Susenas didefinisikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan umumnya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Satu dapur yang dimaksud merupakan suatu kesatuan pembiayaan dan kepengurusan kebutuhan sehari-hari rumah tangga dikelola secara bersama-sama. Pada bagian profil rumah tangga ini akan dibahas tentang karakteristik rumah tangga.

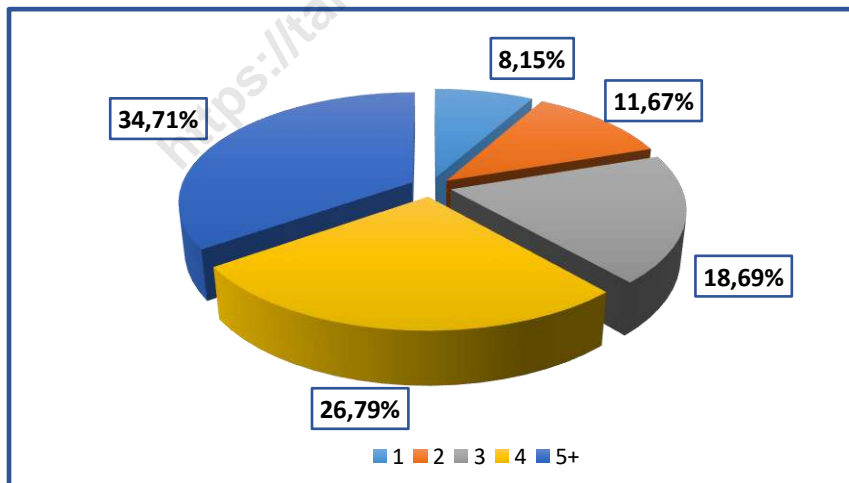
3.3.1 Jumlah Anggota Rumah Tangga

Jumlah anggota rumah tangga menunjukkan ukuran rumah tangga, dan mempengaruhi jumlah kebutuhan yang dikonsumsi rumah tangga. Semakin besar ukuran rumah tangga maka

semakin besar kebutuhan rumah tangga, dan sebaliknya. Lebih lanjut, ukuran rumah tangga ini nantinya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga.

Ukuran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Modernisasi dan globalisasi diduga dapat mengubah peran seseorang dalam keluarga menjadi lebih kompleks. Perubahan peran ini dapat mengakibatkan pergeseran struktur keluarga dari *extended family* (keluarga besar, yaitu keluarga inti ditambah sanak saudara) menjadi *nuclear family* (keluarga inti yang hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak).

Gambar 3.
Persentase Rumah Tangga menurut Jumlah Anggota Rumah Tangga, Kota Tarakan Tahun 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

Berdasarkan data hasil Susenas tahun 2018 yang disajikan pada Gambar 3, terlihat bahwa di Kota Tarakan terdapat 34,71 persen rumah tangga yang memiliki jumlah anggota rumah

tangga lebih dari lima orang. Di sisi lain, 8,15 persen rumah tangga di Kota Tarakan merupakan rumah tangga tunggal. Sedangkan rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga 2 orang tercatat 11,67 persen, dan rumah tangga dengan jumlah anggota rumah tangga 3 dan 4 orang masing-masing 18,69 persen dan 26,79 persen.

3.4 Profil Kepala Rumah Tangga

Kepala rumah tangga didefinisikan sebagai salah seorang dari anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala dalam rumah tangga. Profil kepala rumah tangga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, ini dikarenakan karakteristik kepala rumah tangga menunjukkan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari rumah tangga. Karakteristik kepala rumah tangga yang dihasilkan Susenas antara lain jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan kegiatan utama yang dilakukan kepala rumah tangga.

3.4.1 Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga

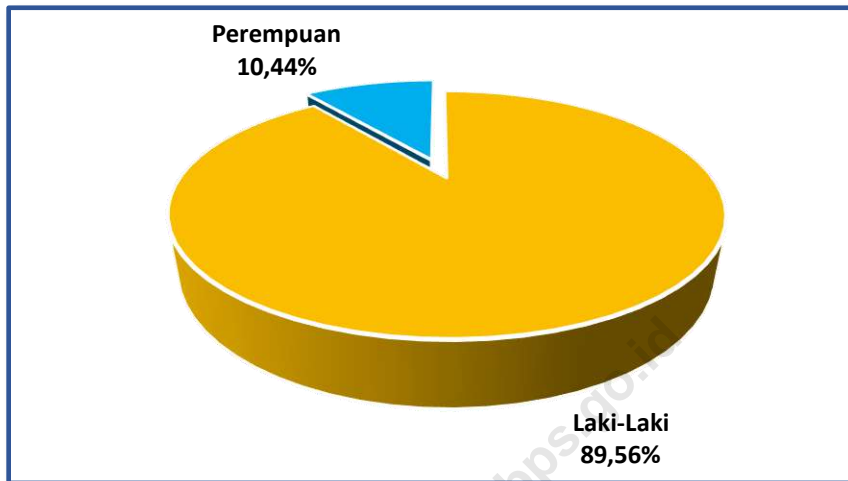
Meskipun dalam masyarakat kita terdapat variasi dalam struktur rumah tangga dan semakin banyaknya rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, akan tetapi masyarakat masih berharap institusi rumah tangga yang dianggap “normal” adalah yang dikepalai oleh laki-laki. Dengan kata lain, seorang manusia yang berjenis kelamin biologis (seks) laki-laki, secara otomatis

akan melekat peran gendernya sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga, sebaliknya perempuan dengan jenis kelamin biologisnya, juga melekat peran gendernya sebagai ibu rumah tangga.

Sementara itu, keberadaan kepala rumah tangga perempuan memberikan gambaran mengenai peran ganda yang dialami perempuan. Perempuan yang fungsi tradisionalnya mengasuh anak dan menyelenggarakan kehidupan rumah tangga turut bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Beban ganda yang dipikul perempuan yang berstatus sebagai kepala rumah tangga mengakibatkan rendahnya kemampuan rumah tangga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Gambar 4 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 di Kota Tarakan persentase perempuan yang menjadi kepala rumah tangga mencapai 10,44 persen. Cukup tingginya persentase perempuan yang menjadi kepala rumah tangga di Kota Tarakan ini menunjukkan adanya beberapa kasus yang menjadi fenomena di Kota Tarakan seperti tingginya angka perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati. Tingginya persentase kepala rumah tangga perempuan ini juga menunjukkan adanya kemandirian perempuan dalam menafkahi dan bertanggung jawab terhadap keluarganya baik dari segi finansial maupun sosial.

Gambar 4.
Persentase Kepala Rumah Tangga menurut Jenis Kelamin, 2018

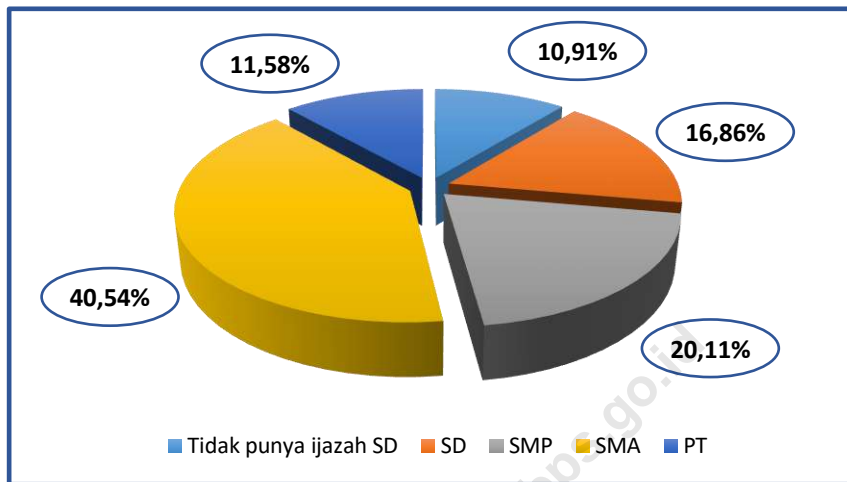


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

3.4.2 Pendidikan Kepala Rumah Tangga

Tingkat pendidikan merupakan salah satu ukuran yang biasa digunakan untuk menentukan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan kepala rumah tangga maka diasumsikan akan semakin baik pula kualitasnya dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Mereka yang berpendidikan lebih tinggi lebih berpeluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Selain itu, kepala rumah tangga yang berpendidikan lebih tinggi tentunya akan lebih mampu dalam mencari ataupun menciptakan pekerjaan maupun memecahkan berbagai masalah yang dihadapi rumah tangga.

Gambar 5.
Persentase Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga, Tahun 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

Gambar 5 menunjukkan bahwa 89,09 persen kepala rumah tangga memiliki ijazah, hal ini menggambarkan bahwa terdapat 10,91 persen kepala rumah tangga yang tidak pernah atau belum tamat dari bangku sekolah dasar. Dari 89,09 persen kepala rumah tangga yang memiliki ijazah, hampir sebagian kepala rumah tangga atau sebanyak 40,54 persen menamatkan SMA/ sederajat. Semakin banyak kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi, maka semakin banyak pula rumah tangga dengan kualitas, kemampuan, dan produktivitas yang lebih baik. Sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan penghidupan yang layak lebih terbuka. Sementara itu, masih terdapat 16,86 persen kepala rumah tangga hanya memiliki ijazah SD/ sederajat, dan 20,11 persen kepala rumah tangga memiliki ijazah SMP/ sederajat.



BAB 4

KETENAGAKERJAAN





- Simpang Tiga



Dalam proses pembangunan, penduduk berada pada dua posisi, yaitu sebagai pelaku pembangunan sekaligus sebagai sasaran dari pembangunan itu sendiri. Sebagai pelaku dalam pembangunan, jumlah penduduk yang besar dapat memberikan nilai positif bagi pembangunan, yang berarti makin banyak modal SDM yang dimiliki, dengan catatan bahwa kualitas SDM yang ada dapat diberdayakan serta memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sebaliknya, jika SDM yang ada tidak dapat diberdayakan dan kualitasnya tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, jumlah penduduk yang banyak justru menjadi beban pembangunan dan akan membawa dampak negatif pada bidang kehidupan penduduk itu sendiri.

Begitu juga dengan penduduk usia produktif atau usia kerja (15 tahun ke atas). Kelompok ini dapat menjadi aset bagi bangsa sebagai agen pembangunan, namun juga bisa menjadi beban pada saat yang sama. Apabila penduduk usia kerja ini didominasi oleh penduduk dengan kualitas pendidikan dan keterampilan yang tinggi, maka mereka akan menjadi aset bagi bangsa dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, apabila penduduk usia kerja ini didominasi oleh mereka yang memiliki pendidikan dan keterampilan rendah, maka mereka akan menjadi beban bagi bangsa dan daerah dalam menuju kemajuan.

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dapat dibagi menjadi dua bagian yakni penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas, sehingga penduduk bukan usia kerja didefinisikan kebalikannya. Menurut konsep *International Labor*

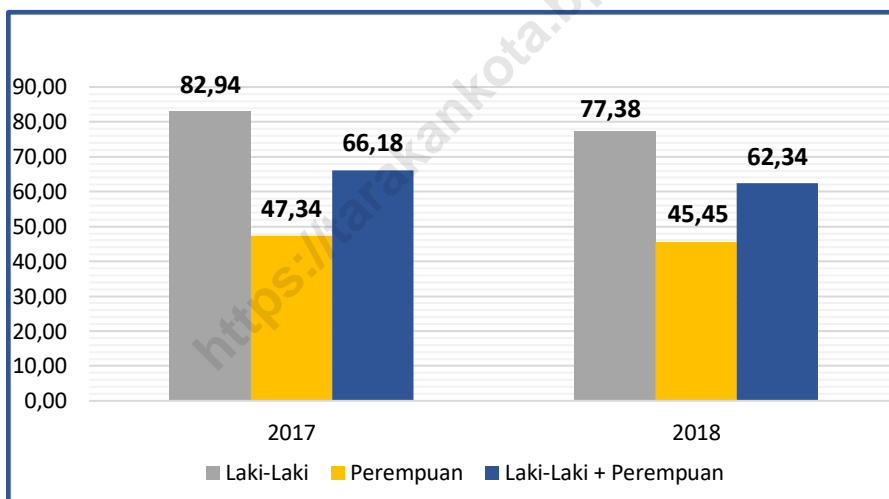
Organization (ILO), penduduk usia kerja dapat dibagi lagi menjadi penduduk angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Kedua kelompok ini dipisahkan berdasarkan partisipasinya dalam kegiatan ekonomi, mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi termasuk dalam angkatan kerja sedangkan mereka yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi masuk dalam kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja dan mereka yang masuk sebagai pengangguran. Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja adalah mereka yang berstatus mengurus rumah tangga, bersekolah, atau lainnya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting dan digunakan untuk menganalisa serta mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia 15 tahun ke atas).

Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Tarakan tahun 2018 mencapai 62,34 persen. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 3,84 poin jika dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja. Penurunan ini terjadi baik pada angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Meskipun begitu, angkatan kerja di Kota Tarakan masih tergolong cukup banyak sehingga perluasan lapangan usaha demi peningkatan penyerapan angkatan kerja tersebut masih perlu diupayakan.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, maka terlihat bahwa TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Terlihat bahwa selisih tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh semakin baiknya persamaan gender sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam bersaing di pasar tenaga kerja.

Gambar 6.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin,
Kota Tarakan Tahun 2017-2018

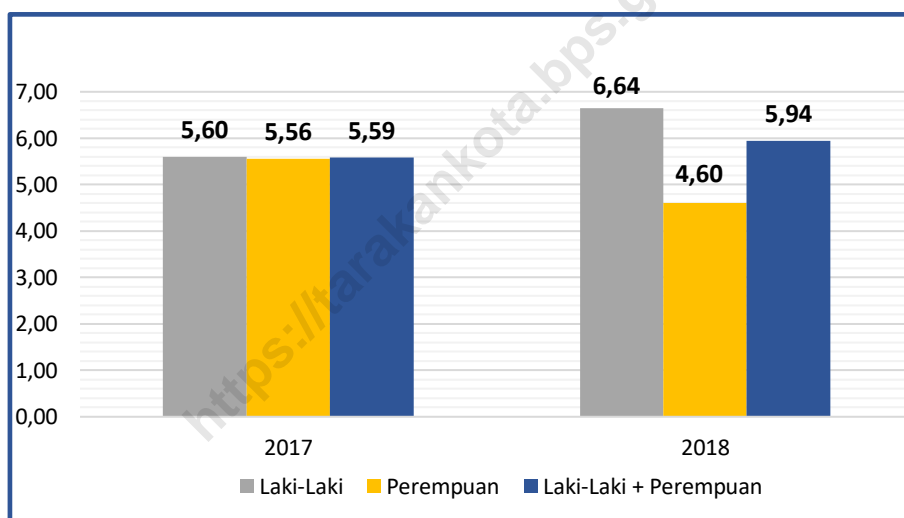


Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, BPS Kota Tarakan

Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga

mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 7.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin
Kota Tarakan, Tahun 2017-2018



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, BPS Kota Tarakan

Tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 di Kota Tarakan sebesar 5,94 persen mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin jika dibandingkan tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pengangguran pada kelompok laki-laki yang meningkat sebesar 1,04 poin dibandingkan tahun 2017. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi penduduk perempuan dimana TPT penduduk perempuan mengalami penurunan hingga 0,96 poin. Fenomena ini

mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja sebagian besar berasal dari angkatan kerja perempuan. Dalam melihat fenomena ini, terdapat asumsi bahwa kecenderungan perempuan dalam bekerja (apapun bidang pekerjaannya) lebih mudah dibandingkan laki-laki.

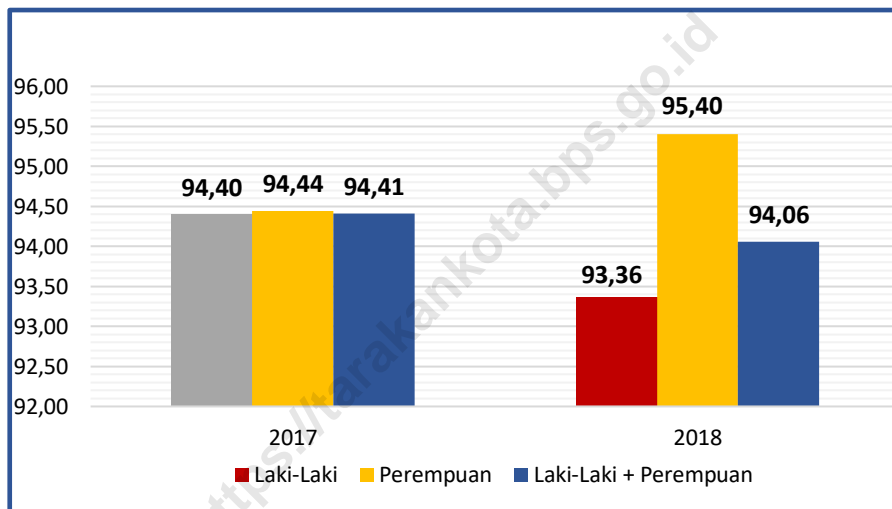
4.2 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu wilayah. TKK mencerminkan daya serap tenaga kerja pada suatu angkatan kerja. Artinya seberapa banyak angkatan kerja yang terserap masuk dalam lapangan kerja. Besarnya daya serap angkatan kerja yang masuk dalam lapangan kerja berbanding terbalik dengan besarnya pengangguran terbuka. Semakin tinggi daya serap angkatan kerja maka proporsi pengangguran terbuka semakin kecil nilainya dan sebaliknya. Sehingga, semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.

Seiring dengan perubahan tingkat pengangguran terbuka, tingkat kesempatan kerja yang tersedia di daerah ini juga mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena kedua komponen ini saling berkaitan. Tingkat kesempatan kerja di Kota Tarakan tahun 2018 menurun hingga mencapai 94,06 persen seperti digambarkan pada Gambar 8. Jika dilihat menurut jenis kelamin, tingkat kesempatan kerja perempuan semakin meningkat dalam kurun waktu tiga tahun

(2015-2018) dan membuat selisih tingkat kesempatan kerja perempuan dan laki-laki berkisar 2,04 poin. Hal ini mengindikasikan pada tahun 2018, penyerapan tenaga kerja perempuan lebih baik jika dibandingkan penyerapan tenaga kerja laki-laki.

Gambar 8.
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Jenis Kelamin
Kota Tarakan, Tahun 2017-2018



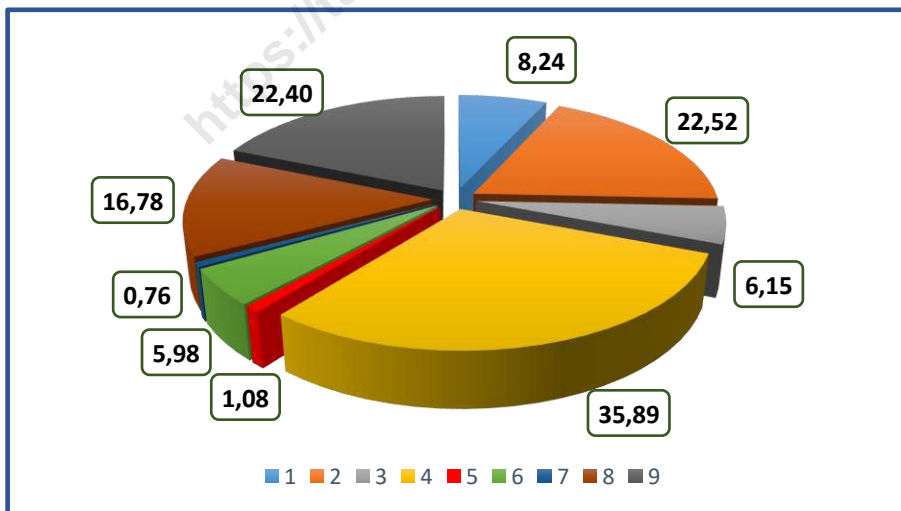
Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, BPS Kota Tarakan

4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Proporsi pekerja menurut lapangan usahanya merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Penggolongan sektor usaha dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui andil setiap sektor dalam menyerap tenaga kerja. Sehingga perubahan kontribusi sektor dalam penyerapan tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan gambaran perubahan struktur perekonomian suatu daerah.

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 9 sektor lapangan usaha yaitu 1: Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan; 2: Industri, Pertambangan dan Penggalian, serta Aktivitas Industri Lainnya; 3: Konstruksi; 4: Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real estate; 5: Informasi dan Komunikasi; 6: Keuangan dan Aktivitas Keuangan; 7: Aktivitas Profesional, Ilmiah, Teknis, Administratif dan Jasa Pendukung Lainnya; 8: Administrasi Publik, Pertahanan, Aktivitas Pendidikan dan Kesehatan Manusia, serta Aktivitas Sosial; 9: Aktivitas Jasa Lainnya;

Gambar 9.
Persentase Penduduk berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Kerja Utama, Tahun 2018



Ket : 1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan; 2. Industri, Pertambangan dan Penggalian, serta Aktivitas Industri Lainnya; 3. Konstruksi; 4. Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Real estate; 5. Informasi dan Komunikasi; 6. Keuangan dan Aktivitas Keuangan; 7. Aktivitas Profesional, Ilmiah, Teknis, Administratif dan Jasa Pendukung Lainnya; 8. Administrasi Publik, Pertahanan, Aktivitas Pendidikan dan Kesehatan Manusia, serta Aktivitas Sosial; 9. Aktivitas Jasa Lainnya;

Aktivitas Pendidikan dan Kesehatan Manusia, serta Aktivitas Sosial; 9. Aktivitas Jasa Lainnya;

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, BPS Kota Tarakan

Gambar 9 menunjukkan bahwa pada tahun 2018 penyerapan tenaga kerja terbanyak terlihat pada sektor Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi (35,89 persen). Hal ini mengingat Tarakan merupakan kota transit atau pintu gerbang masuk Kalimantan Utara sehingga arus orang dan barang sangat tinggi intensitasnya.

Sektor kedua dan ketiga terbanyak adalah sektor Industri, Pertambangan dan Penggalian, serta Aktivitas Industri Lainnya sebesar 22,52 persen dan sektor Aktivitas Jasa Lainnya sebesar 22,40 persen. Sedangkan sektor Informasi dan Komunikasi (1,08 persen) serta sektor Aktivitas Profesional, Ilmiah, Teknis, Administratif dan Jasa Pendukung Lainnya (0,76 persen) dapat dikatakan merupakan sektor yang kurang potensial.

Selain distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, proporsi penduduk berdasarkan status pekerjaannya juga perlu diketahui antara lain untuk melihat seberapa besar penduduk yang telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri (mempunyai usaha) dan seberapa besar penduduk yang mengisi lowongan pekerjaan yang disediakan oleh orang lain. Selain itu, data ini diperlukan pula dalam penentuan kebijakan terkait program pembinaan usaha, peningkatan kapasitas pekerja, dan lain sebagainya.

Tabel 2.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, Kota Tarakan Tahun 2018

Status pada Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri	17,41	16,51	17,10
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	3,67	8,29	5,28
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	6,36	0,54	4,33
Buruh/karyawan/pegawai	66,24	60,81	64,35
Pekerja bebas di pertanian	0,00	0,04	0,01
Pekerja bebas di non pertanian	2,83	0,68	2,08
Pekerja keluarga/tidak dibayar	3,48	13,12	6,84
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, BPS Kota Tarakan

Pada Tabel 2, tampak bahwa dominasi status pekerjaan utama penduduk Kota Tarakan pada tahun 2018 adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu sebanyak 64,35 persen dari seluruh pekerja. Persentase ini meningkat bila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 yang masih sebanyak 62,34 persen dari seluruh pekerja. Sedangkan apabila dianalisis lebih lanjut, persentase penduduk yang berstatus 'berusaha', baik yang berusaha sendiri, dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, maupun dibantu buruh tetap/dibayar sebesar 26,71 persen. Bagian terkecil penduduk Kota

Tarakan berstatus sebagai pekerja bebas di pertanian sebesar 0,01 persen yang hampir seluruhnya diisi oleh penduduk perempuan.

Jika dilihat struktur penyerapan tenaga kerjanya, pada laki-laki penyerapan tenaga kerja terbanyak pada status buruh/karyawan/pegawai (66,24 persen) disusul berusaha sendiri (17,41 persen). Sedangkan pada perempuan status buruh/karyawan/pegawai sebanyak 60,81 persen disusul berusaha sendiri (16,81 persen).

4.4 Jumlah Jam Kerja

Gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kota Tarakan tidak cukup berhenti pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya. Informasi menarik lainnya adalah terkait jumlah jam kerja yang digunakan penduduk usia kerja yang bekerja selama seminggu yang lalu. Jam kerja sering dikaitkan dengan penghasilan atau pendapatan yang akan diterima.

Seseorang dikatakan bekerja dengan jumlah jam kerja normal apabila selama seminggu terakhir (masa referensi survei) dia bekerja tidak kurang dari 35 jam. Seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu tergolong kedalam kelompok setengah penganggur. Apabila seseorang yang sudah memiliki pekerjaan, namun selama seminggu terakhir (masa referensi survei) karena satu dan lain hal yang bersangkutan memiliki jam kerja nol jam, maka yang bersangkutan dikatakan sedang sementara tidak bekerja.

Tabel 3.

Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Seluruh Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Kota Tarakan Tahun 2018

Jumlah Jam Kerja	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 Jam	3,71	3,71	3,71
1-34 Jam	18,57	23,18	20,18
≥ 35 Jam	77,72	73,11	76,11
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2018, BPS Kota Tarakan

Berdasarkan data Sakernas tahun 2018, sebagian besar pekerja di Kota Tarakan bekerja selama lebih dari 35 jam seminggu yang lalu (masa referensi survei) yaitu sekitar 76,11 persen. Selain itu, diantara penduduk yang bekerja, sebanyak 20,18 persen tenaga kerja memiliki jam kerja selama 1-34 jam. Sedangkan sebanyak 3,71 persen tenaga kerja merupakan tenaga kerja yang dikategorikan sementara tidak bekerja karena memiliki jumlah jam kerja nol selama seminggu yang lalu.

Jika dibedakan menurut jenis kelamin, persentase penduduk perempuan yang memiliki jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu cukup besar yaitu 23,18 persen berbeda dengan penduduk laki yang hanya 18,57 persen. Sedangkan tenaga kerja perempuan yang bekerja full time lebih dari 35 jam lebih sedikit jika dibandingkan tenaga kerja laki-laki (77,72%).



BOB 5 PERUMAHAN





Menara
MENARA

Islamic
ISLAMIC

Centre
CENTRE

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kebutuhan manusia, rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung, tetapi fungsinya

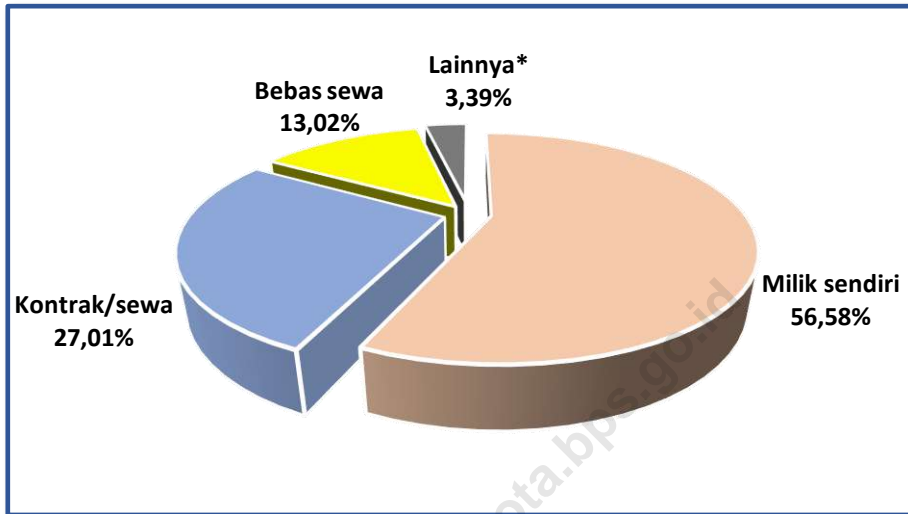
sebagai tempat tinggal lebih menonjol. Oleh karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan bahkan estetika bagi masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini terkait dengan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan memberikan sumbangan dalam kenyamanan hidup sehari-hari. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan tersebut diantaranya dapat terlihat dari luas lantai rumah, sumber air minum, dan fasilitas tempat buang air besar.

5.1 Status Kepemilikan Rumah

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dalam jangka panjang. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup dalam bahasan ini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, atau status rumah kepemilikan lainnya.

Gambar 10.
Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan
Tempat Tinggal yang Ditempati, 2018



**termasuk rumah lainnya adalah rumah dinas, rumah adat, dll*

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

Rumah tangga di Kota Tarakan berdasarkan hasil Susenas 2018, sebagian besar (sekitar 56,58 persen) menempati rumah milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah dengan status kontrak/sewa sebanyak 27,01 persen. Sedangkan 13,02 persen menempati rumah dengan status bebas sewa dan 3,39 persen menempati rumah dengan status rumah dinas, rumah adat, dll.

5.2 Kualitas Rumah Tinggal

Kualitas rumah tinggal berpengaruh terhadap kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenyamanan adalah rumah yang luas disertai kualitas atap, dinding serta lantai yang layak. Apabila sudah memenuhi

beberapa kriteria tersebut, sebuah rumah dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, seluruh rumah tangga di Kota Tarakan memiliki rumah dengan lantai bukan tanah, dinding rumah terluas berupa tembok atau kayu dan atap terluas rumah tinggalnya adalah beton/genteng/sirap/seng/asbes.

Menurut Kementerian Kesehatan, kepadatan penghuni diketahui dengan membandingkan luas lantai rumah dengan jumlah penghuni, dengan ketentuan untuk daerah perkotaan 6 m² dan daerah perdesaan 10 m². Sedangkan menurut Permenpera, luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m² per orang sampai dengan 12

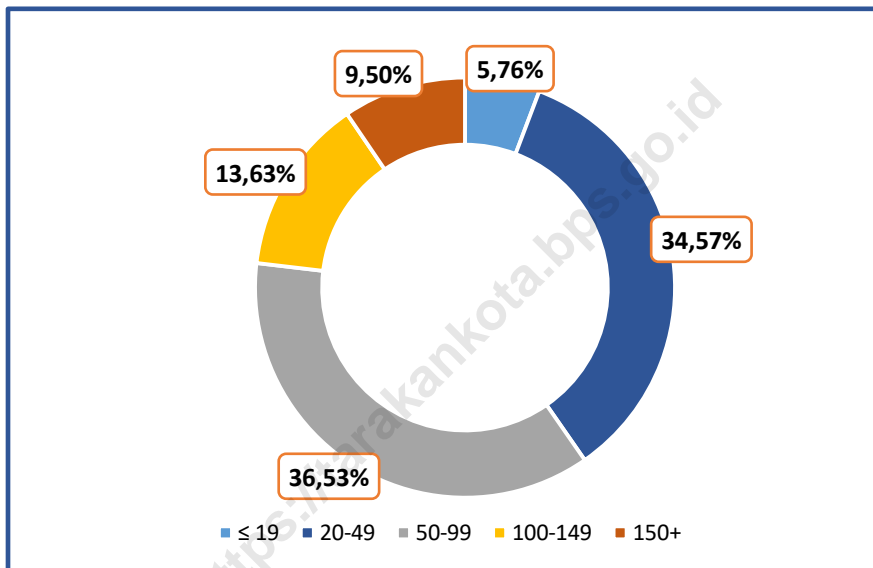


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

m² per orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi. Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di rumah. Aktivitas tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi,

kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Pada tahun 2018, rumah tangga di Kota Tarakan yang memiliki luas lantai untuk tiap penghuninya di atas 7,2 m² sekitar 85,56 persen.

Gambar 12.
Persentase Rumah Tangga menurut
Luas Lantai Tempat Tinggal (m²), Kota Tarakan Tahun 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

Jika dilihat menurut luas lantai tempat tinggal, dapat dilihat dari Gambar 12 bahwa rumah tangga di Kota Tarakan didominasi oleh rumah tangga dengan luas lantai 50-99 m² yaitu sekitar 36,53 persen. Rumah tangga dengan luas lantai 20-49 m² sekitar 34,57 persen dan sekitar 13,63 persen yang luas lantainya 100-149 m². Sedangkan rumah tangga yang luas lantainya lebih dari 150 m² sekitar 9,50 persen dan yang kurang dari 19 m² hanya sekitar 5,76 persen saja.

5.3 Fasilitas Rumah Tinggal

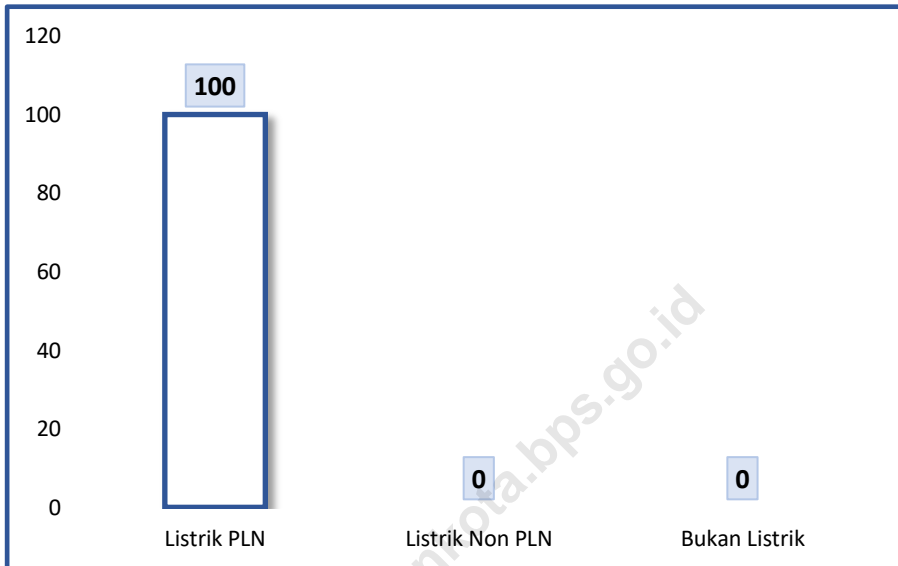
Kesejahteraan rumah tangga secara fisik dapat diukur dengan melihat kondisi dan kelengkapan fasilitas sebuah tempat tinggal, di mana masing-masing anggota rumah tangga melakukan aktivitas di dalamnya. Kelengkapan suatu rumah dapat menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang secara langsung juga menentukan kualitas rumah tersebut. Fasilitas rumah yang diperlukan agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditempati adalah adanya sumber penerangan, air untuk minum, dan fasilitas tempat buang air besar.

5.3.1 Sumber Penerangan

Aspek perumahan yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan penerangan. Dengan penerangan yang cukup, manusia bisa hidup sehat, nyaman dan beraktivitas. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (baik listrik yang berasal dari PLN maupun Non PLN), karena cahayanya yang lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2018, seluruh rumah tangga di Kota Tarakan menggunakan listrik PLN sebagai sumber penerangan utama di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa fasilitas penerangan di Kota Tarakan sudah memadai sehingga dapat menunjang kesejahteraan rumah tangga.

Gambar 13.
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Utama
Penerangan Rumah Tangga, Kota Tarakan Tahun 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

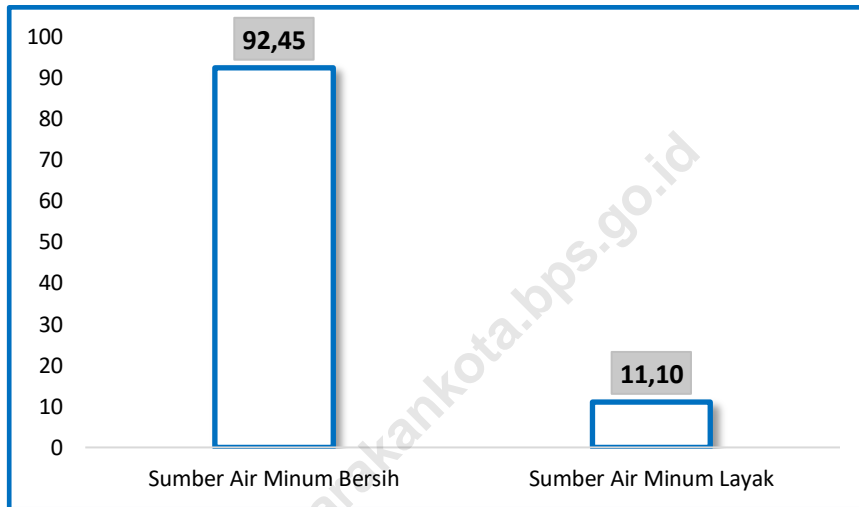
5.3.2 Sumber Air Minum

Ketersediaan fasilitas air minum pada suatu tempat tinggal dapat menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Pada umumnya, rumah tangga yang penggunaan fasilitas air minumnya hanya digunakan oleh satu rumah tangga lebih terjamin kesehatan, kebersihan, kenyamanan dan keelulasaan penggunaan dibandingkan rumah tangga yang fasilitas air minumnya digunakan oleh beberapa rumah tangga.

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah terus menerus mengupayakan program penyediaan air bersih yang salah satu

tujuannya adalah memastikan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak.

Gambar 14.
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Sumber Air Minum Bersih dan Sumber Air Minum Layak, Tahun 2018

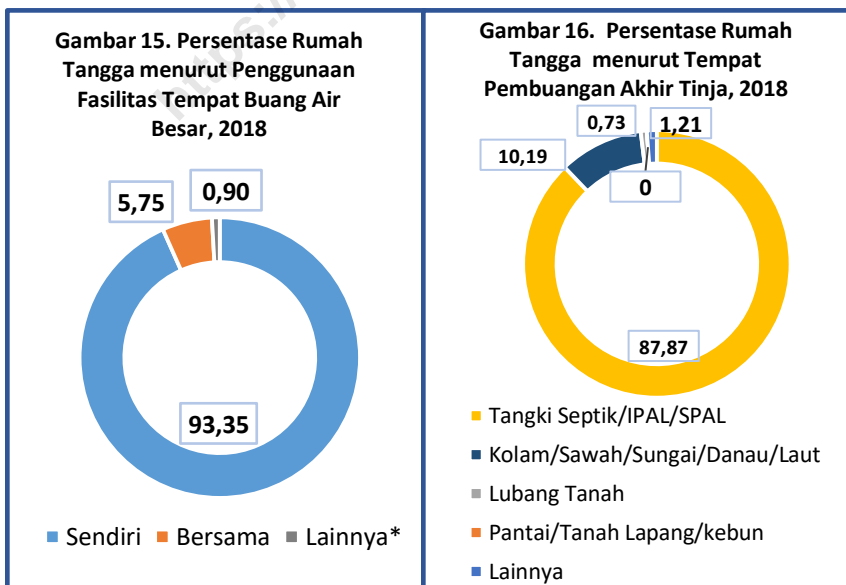


Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

Persentase rumah tangga di Kota Tarakan yang menggunakan sumber air minum bersih adalah sekitar 92,45 persen. Air minum bersih adalah sumber air minum yang berasal dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m. Sedangkan rumah tangga yang mengkonsumsi air minum dari sumber air minum layak adalah sekitar 11,10 persen. Sumber air minum layak meliputi leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat lebih dari 10 m.

5.3.3 Fasilitas Buang Air Besar

Serupa dengan fasilitas air minum, fasilitas tempat buang air besar juga dapat menentukan tingkat kesehatan penghuninya. Rumah yang fasilitas tempat buang air besarnya dimiliki dan digunakan hanya oleh rumah tangga tersebut cenderung memiliki kualitas kesehatan yang lebih baik dibandingkan rumah tangga yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Selain ketersediaan fasilitas tempat buang air besar, kelengkapan tempat penampungan akhir kotoran juga merupakan salah satu faktor penentu kesehatan rumah tangga. Berdasarkan kelengkapan tempat penampungan akhir kotoran, rumah tangga dikatakan sehat apabila penampungan akhirnya menggunakan *septic tank* atau SPAL (Sistem Pembuangan Air Limbah).



*Lainnya termasuk MCK Umum dan tidak ada/tidak menggunakan fasilitas buang
 Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

Dari hasil Susenas 2018, tercatat bahwa di Kota Tarakan terdapat sebanyak 93,35 persen rumah tangga yang telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan penggunaan fasilitas buang air besar semakin membaik. Sementara itu, terdapat 5,75 persen rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar secara bersama-sama dan sisanya sebesar 0,90 persen adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas umum/MCK Komunal, termasuk juga rumah tangga yang tidak menggunakan fasilitas buang air besar.

Selain itu, usaha sanitasi yang cukup penting peranannya adalah penyediaan sarana jamban. Ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Maka dari itu, pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan. Ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik merupakan fasilitas rumah tinggal yang berkait erat dengan hal tersebut. Sekitar 87,87 persen rumah tangga di Kota Tarakan memiliki pembuangan akhir kotoran yang berupa tangki septik. Sisanya membuang kotoran di tempat lain seperti kolam, sawah sungai, danau, maupun di pantai, tanah lapang maupun kebun serta di tempat lainnya.



BAB 6

POLA KONSUMSI





Perubahan sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat dapat mengubah pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi merupakan salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya serta lingkungan setempat. Pola konsumsi rumah tangga secara umum dapat diungkapkan dari data pengeluaran dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran untuk rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk.

Secara umum, makin besar proporsi pengeluaran non makanan penduduk suatu wilayah menunjukkan makin tinggi tingkat kesejahteraan wilayah tersebut. Hal ini dapat dipahami karena pengeluaran makanan merupakan pengeluaran paling pokok bagi

manusia. Sehingga jika proporsi pengeluaran bukan makanan jauh lebih besar dari pengeluaran makanan dapat mengindikasikan kebutuhan pokoknya sudah jauh terpenuhi.

Di sisi lain, berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan pendapatan penduduk meningkat, sebaliknya meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya pendapatan penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui perbandingan antara tingkat pendapatan dengan tingkat kebutuhan minimum untuk hidup layak.

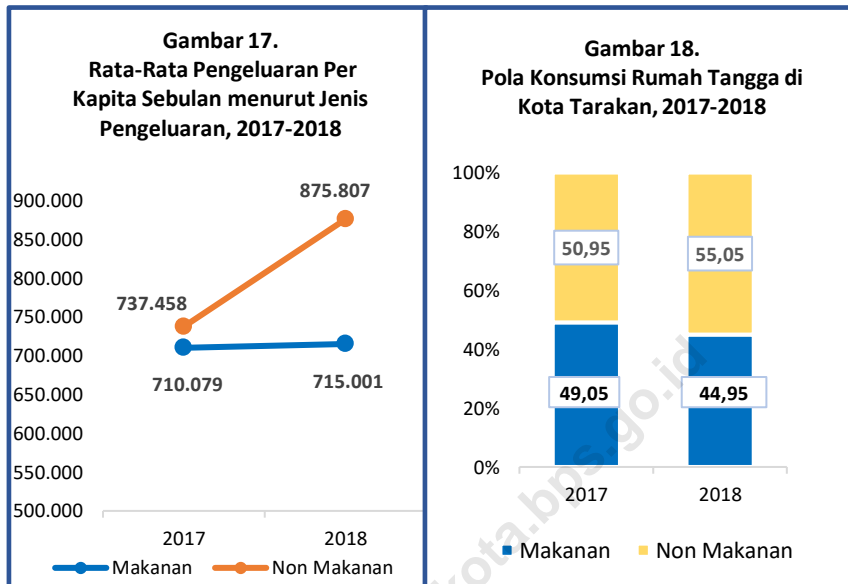
Tingkat kesejahteraan masyarakat selain dapat diukur dengan pendapatan perkapita, juga dapat dilihat melalui pola konsumsi/pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pada umumnya data tentang pendapatan sulit dikumpulkan. Oleh karena itu pembahasan taraf kesejahteraan penduduk didasarkan pada data pengeluaran yang merupakan pendekatan (*proksi*) dari pendapatan.

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan

terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan penduduk Kota Tarakan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.590.808,- naik dibandingkan tahun 2016 yang sebesar Rp. 1.447.537,-. Jika dilihat dari jenis pengeluarannya, di tahun 2018 rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan sebesar Rp. 715.001,- dan untuk non makanan sebesar Rp. 875.807,-. Rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan dan non makanan di tahun 2018 ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan sebesar Rp. 710.079,- dan untuk non makanan sebesar Rp. 737.458,-. Pengaruh inflasi atau kenaikan harga barang yang dikonsumsi masyarakat merupakan salah satu penyebab peningkatan Pengeluaran rata-rata per kapita per bulan. Di sisi lain kenaikan pengeluaran juga mengindikasikan peningkatan daya beli maupun peningkatan perekonomian penduduk di Kota Tarakan.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

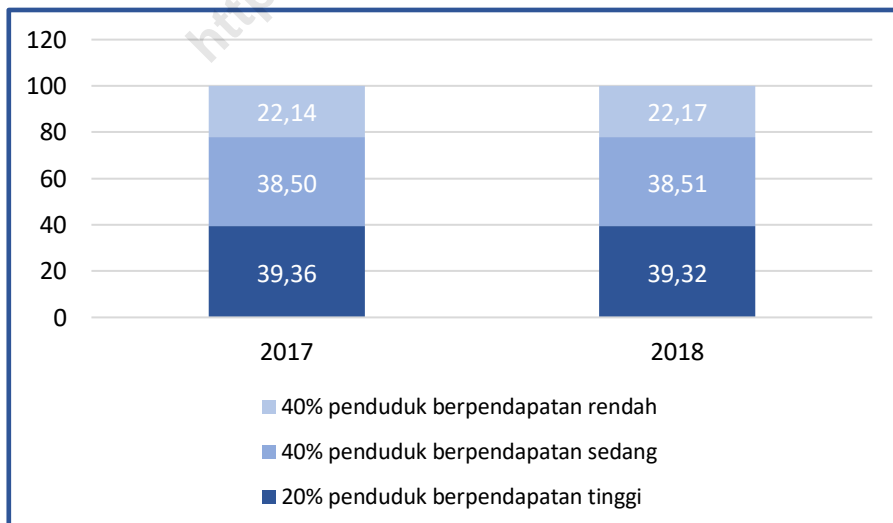
Jika sebelumnya disampaikan bahwa terjadi kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan pada kelompok makanan maupun non makanan, kini akan dibahas mengenai persentase distribusi pengeluaran maupun non pengeluaran terhadap total pengeluaran. Porsi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk makanan sebesar 44,95 persen dari total pengeluaran. Porsi pengeluaran penduduk turun 4,10 poin dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 49,05 persen. Dapat disimpulkan bahwa porsi rata-rata pengeluaran non makanan masih lebih besar dibandingkan porsi pengeluaran rata-rata untuk komoditi non makanan baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2017.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank

Dunia, yaitu dengan melihat persentase pengeluaran yang mampu dibelanjakan oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah, 40 persen penduduk yang berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah.

Ketimpangan pendapatan penduduk digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut: a) kurang dari 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi; b) mencapai 12–17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang; c) lebih besar dari 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Gambar 19.
Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Tarakan, 2018



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018, BPS Kota Tarakan

Gambar 19 menyajikan distribusi pendapatan penduduk Kota Tarakan tahun 2017 dan 2018. Merujuk pada ukuran di atas, ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Tarakan tergolong rendah dikarenakan secara keseluruhan pada masing-masing kelompok memiliki distribusi pendapatan lebih dari 17 persen. Pada tahun 2018, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima sekitar 22,17 persen dari total pendapatan. Sementara 40 persen penduduk berpendapatan sedang sekitar 38,51 persen dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi sekitar 39,32 persen.

Dibandingkan dengan tahun 2017, pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah mengalami peningkatan pada porsi pendapatan yang diterima. Pada tahun 2017, porsi pendapatan yang diterima sebesar 22,14 persen, yang berarti pada tahun 2018 terjadi penurunan sekitar 0,04 poin. Peningkatan porsi pendapatan juga terjadi pada kelompok 40 persen penduduk berpendapatan sedang. Peningkatan terjadi sebesar 0,01 poin dari 39,50 persen di tahun 2017. Peningkatan di dua kelompok penduduk tersebut menyebabkan penurunan pada kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Pada tahun 2017, porsi pendapatan yang diterima oleh kelompok penduduk ini sebesar 39,36 persen dan menurun menjadi 39,32 persen pada tahun 2018.



<https://tarakankota.bps.go.id>

BAIB 7

PENUTUP



Hutan Mangrove

HUTAN MANGROVE

Kesejahteraan sosial masyarakat memang menjadi salah satu komoditas utama dalam tujuan pembangunan daerah disamping perekonomian daerah, infrastruktur maupun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh karena itu, setiap upaya pendukung pencapaian target pembangunan daerah menjadi poin penting untuk dipelajari dan diimplementasikan termasuk dalam meningkatkan pengetahuan terkait data dan informasi pembangunan, khususnya terkait sosial ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian dari simpul pemerintah daerah, BPS Kota Tarakan mendiseminasikan data dan informasi pembangunan salah satunya berupa publikasi Statistik Sosial Ekonomi Kota Tarakan dengan beberapa kesimpulan yang penting, antara lain:

- a. Pada rentang waktu tahun 2013 hingga 2018, jumlah penduduk Kota Tarakan terus mengalami peningkatan. Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduknya, Kota Tarakan mengalami penurunan terus dari tahun 2014 hingga kini di kisaran 3,56 persen.
- b. Pola persebaran di Kota Tarakan terlihat belum merata. Sebagian besar penduduk Kota Tarakan terkonsentrasi di Kecamatan Tarakan Barat dengan persentase mencapai 35,03 persen. Hal ini mengakibatkan perbedaan kepadatan penduduk yang mencolok antar kecamatan di Kota Tarakan.
- c. Secara umum, kondisi ketenagakerjaan di Kota Tarakan sudah cukup baik. TPAK Kota Tarakan tahun 2018 mencapai 62,34 persen. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 3,84 poin jika dibandingkan dengan tahun 2017. Sedangkan TPT tahun 2018 di Kota Tarakan sebesar 5,94 persen mengalami kenaikan sebesar 0,35 poin persen jika dibandingkan tahun 2017.
- d. Tercatat 56,58 persen rumah tangga telah mempunyai rumah milik sendiri dengan fasilitas perumahan yang relatif mendukung. Sebagian besar rumah tangga (93,35 persen) memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri. Bahkan seluruh rumah tangga di Kota Tarakan memiliki rumah dengan lantai bukan tanah.
- e. Rata-rata pengeluaran per kapita untuk makanan dan non makanan penduduk Kota Tarakan pada tahun 2018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2017, dengan porsi rata-rata

pengeluaran non makanan masih lebih besar dibandingkan porsi pengeluaran rata-rata untuk komoditi non makanan baik pada tahun 2018 maupun pada tahun 2017.

Berdasarkan indikator statistik ekonomi Kota Tarakan yang telah disajikan dalam bab-bab sebelumnya, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan direkomendasikan antara lain:

- a. Peningkatan jumlah penduduk perlu diimbangi dengan peningkatan kualitasnya, sehingga benar-benar bisa menjadi angkatan kerja yang berkualitas sehingga selanjutnya akan mendapatkan pekerjaan dengan pendapatan yang layak. Peningkatan kualitas penduduk dalam hal ini lebih kepada pendidikan maupun keterampilan baik dalam bekerja maupun berwirausaha.
- b. Persebaran penduduk yang kurang terdistribusi merata merupakan salah satu dampak dari pembangunan daerah yang belum menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan khususnya untuk Kecamatan Tarakan Utara maupun Kecamatan Tarakan Timur harus lebih diupayakan sehingga persebaran penduduk dapat lebih merata, termasuk menurunkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
- c. Analisis pada kondisi perumahan di Kota Tarakan, beberapa masih mengindikasikan belum optimalnya perwujudan infrastruktur wilayah. Mengingat Kota Tarakan merupakan daerah perkotaan dan hanya memiliki wilayah yang tidak luas, seyogyanya hasil pembangunan daerah dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI. 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Jakarta.

Badan Pusat Statistik RI. 2018. Pedoman Pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018. Jakarta.

Badan Pusat Statistik RI. 2018. Pedoman Pencacahan Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2018. Jakarta.

Kementerian Kesehatan RI. 2015. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. Jakarta.
www.depkes.go.id/resources/download/info-publik/Renstra-2015.pdf



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENGERDASKAN BANGSA



**Badan Pusat Statistik
Kota Tarakan**

Jl. P. Kalimantan No. 9, Kampung 1 Skip, Kota Tarakan,
Telp/Fax : 0551-31715

Email : bps6473@bps.go.id; Website: tarakankota.bps.go.id